

Determinasi Financial Sustainability pada Pemerintah Daerah: Pendekatan Keuangan Publik

Annisa Fitriana Kusumawati*, Susilaningdyah Mustikawati, Putri Linggasari Sofi, Rafi Amani Muflih Rahardi,
Aditya Saputra, Pipit Febrianasyah Putri, Arisna Yuliana Putri

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia

Jalan Ahmad Yani, Pabelan, Kartasura, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

Email: ¹*afk162@ums.ac.id, ²sm493@ums.ac.id, ³pls719@ums.ac.id, ⁴ram872@ums.ac.id, ⁵as817@ums.ac.id, ⁶pfp167@ums.ac.id,
⁷ayp194@ums.ac.id

Email Penulis Korespondensi: afk162@ums.ac.id

Abstract—Urgensi dari penelitian ini bermula dari pandemi covid-19 yang meninggalkan beberapa permasalahan, salah satunya dalam perekonomian negara. Kehancuran perekonomian negara berdampak secara langsung terhadap perekonomian pemerintah daerah. Pandemi menyebabkan tekanan fiskal yang signifikan akibat penurunan pendapatan daerah dan meningkatkan kebutuhan belanja publik. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan bagi pemerintah daerah untuk mempertahankan keberlanjutan keuangan dalam jangka panjang. Pemerintah daerah yang memiliki wewenang untuk menjalankan kewajibannya sendiri juga melekatkan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakatnya. Namun, apa yang terjadi saat ini adalah pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah tidak sesuai dengan besarnya belanja daerah yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu, keberlanjutan fiskal menjadi faktor penting yang harus terus dikuatkan untuk mencapai tujuan negara, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mencari bukti empiris mengenai faktor-faktor yang dapat menjadi penentu dari financial sustainability yang ditinjau dari keuangan publik. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan mengambil data laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Jawa tahun 2020-2022 dengan pengolahan data menggunakan SPSS 26. Studi ini menemukan bahwa rasio keserasian, DAK, belanja modal, dan ukuran pemda berpengaruh terhadap financial sustainability. Sedangkan, ketergantungan finansial dan kemandirian daerah tidak berdampak secara signifikan terhadap financial sustainability. Ruang lingkup penelitian hanya terbatas di pulau Jawa tahun 2020-2022 sehingga penelitian ini belum tentu sepenuhnya menggambarkan kondisi keberlanjutan keuangan pemerintah daerah yang memiliki karakteristik ekonomi, kapasitas fiskal, serta struktur pendapatan yang berbeda. Penelitian ini menggunakan data sekunder, dimungkinkan belum mampu untuk menangkap secara komprehensif aspek kualitatif seperti kebijakan fiskal daerah, kapasitas institusional, dan strategi pengelolaan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Penelitian ini memperkaya literatur empiris mengenai financial sustainability di pemerintah daerah. Penelitian ini juga memberikan implikasi praktis bagi pemerintah daerah bahwa upaya peningkatan *financial sustainability* pemerintah daerah perlu difokuskan pada penguatan kualitas pengelolaan belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan DAK, peningkatan investasi melalui belanja modal, serta pengelolaan aset daerah secara efektif sebagai sumber pendukung kapasitas fiskal jangka panjang.

Keywords: Keberlanjutan Keuangan; Ketergantungan Keuangan; Kemandirian Regional; Belanja Modal; Pemerintah Daerah

Abstrak—The urgency of this research stems from the COVID-19 pandemic, which has left several problems, one of which is affecting the national economy. The collapse of the national economy has had a direct impact on the economies of local governments. Local governments, which have the authority to carry out their own obligations, are also obligated to provide optimal services to their communities. However, what is currently happening is that the revenue received by local governments does not match the amount of regional expenditures they must incur. Therefore, fiscal sustainability is a crucial factor that must be continuously strengthened to achieve national goals. The purpose of this research is to analyze and seek empirical evidence regarding the factors that can determine financial sustainability from a public finance perspective. This study uses a quantitative method by taking financial report data from companies in regencies/cities throughout Java for 2020-2022 with data processing using SPSS 26. This study found that the matching ratio, DAK, capital expenditure, and regional government size influence financial sustainability. Meanwhile, financial dependence and regional independence do not significantly impact financial sustainability. The scope of this research is limited to the island of Java between 2020 and 2022, so this study may not fully reflect the financial sustainability of regional governments, which have different economic characteristics, fiscal capacities, and revenue structures. This study uses secondary data, which may not be able to comprehensively capture qualitative aspects such as regional fiscal policies, institutional capacity, and financial management strategies of each regional government. This research adds to the empirical literature on financial sustainability in local governments. It also offers practical implications for local governments in strengthening their financial sustainability efforts, enabling them to optimize their spending structure and utilize transfers from the central government more effectively.

Keywords: Financial Sustainability; Financial Dependence; Regional Independence; Capital Expenditure; Local Governments

1. PENDAHULUAN

Urgensi penelitian ini datang dari pandemi covid-19 yang meninggalkan dampak mendalam pada perekonomian global maupun nasional. Bak domino, kehancuran ekonomi nasional memberikan dampak yang signifikan terhadap pemerintah daerah (Shimada et al., 2022). Sebelum pandemi, *financial sustainability* pemerintah daerah lebih banyak dikaitkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat. Namun, pandemi menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat PAD yang tinggi belum tentu memiliki ketahanan fiskal yang baik apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan belanja yang efisien dan kapasitas fiskal yang memadai. Disini, pandemi telah menggeser fokus pembahasan *financial sustainability* dari sekadar kemampuan untuk menghasilkan pendapatan menuju kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan pendapatan menuju kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan keseimbangan fiskal di tengah guncangan ekonomi. Pemerintah daerah sebagai ujung tombak dari pelayanan publik menghadapi tantangan serius untuk menjaga keberlanjutan keuangan mereka di tengah penurunan aktivitas ekonomi,

ketidakpastian fiskal, serta meningkatnya kebutuhan belanja sosial (Muneer et al., 2025). Sebagai pemerintah yang menjunjung tinggi desentralisasi fiskal, dalam menghadapi kondisi *force majeure* dan untuk menutupi lonjakan belanja sosial tersebut menuntut pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan daerahnya melalui PAD (Pendapatan Asli Daerah) (Kurniawan, 2022), yang mana PAD seringkali dikaitkan erat dengan kemandirian daerah. Optimalisasi PAD sebagai lambang dari kemandirian daerah ini terus didorong sebagai salah satu indikator dari keberhasilan desentralisasi fiskal. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah atas sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya dan pemerintah daerah diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola pendapatan tersebut dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Yang mana, era ketidakpastian ekonomi ini memaksa daerah untuk dapat mandiri dengan mengoptimalkan pendapatan daerahnya sendiri sebagai salah satu sumber utama dari keberlanjutan fiskal.

Teori *stewardship* yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis (1991) yang menggambarkan bahwa manajemen lebih termotivasi untuk melakukan tujuan-tujuan organisasi dibandingkan dengan tujuan-tujuan individu sebagai sasaran utama kepentingan organisasi (Abraham et al., 2024). Penelitian ini didasarkan pada *stewardship theory* yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebagai *steward* memiliki tanggungjawab untuk mengelola sumber daya publik secara optimal demi kepentingan masyarakat sebagai prinsipal. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, pemerintah tidak hanya dituntut untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik jangka pendek, tetapi juga menjaga keberlanjutan fiskal agar generasi mendatang tetap memperoleh manfaat dari sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan, belanja, transfer dari pemerintah pusat, serta aset daerah menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan *financial sustainability* sebagai bentuk dari pertanggungjawaban kepada masyarakat. Berdasarkan dari perspektif *stewardship theory* tersebut, *financial sustainability* menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu menjalankan amanah pengelolaan keuangan secara berkelanjutan.

Disisi lain, selain dari sisi pendapatan, keberlanjutan keuangan daerah juga ditentukan dari besarnya belanja daerah yang dilakukan. Dalam era pandemi dan pasca pandemi ini, untuk menghadapi krisis, pemerintah harus dapat mengatur perekonomian dengan seefisien mungkin, yakni harus dapat menyeimbangkan antara pengeluaran dan pendapatan (D. Wang et al., 2022). Namun, dengan tingginya belanja sosial di era pandemi tersebut membuat pemerintah daerah mengesampingkan belanja modal mereka. Yang mana belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat memperoleh aset atau investasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia (Rahmawati, n.d.). Kedua belanja tersebut menjadi indikator penting dalam menciptakan keberlanjutan keuangan jangka panjang. Ketidakseimbangan antara kedua belanja tersebut, yakni dengan tingginya atau dominasi belanja operasional, dan atau rendahnya belanja pembangunan menciptakan pelemahan kapasitas fiskal daerah meskipun daerah tersebut telah digolongkan sebagai pemda dengan kemandirian fiskal yang tinggi yang dinilai mampu untuk memenuhi kesejahteraan masyarakatnya.

Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah pusat turut berpartisipasi melalui dana alokasi khusus (DAK) yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kebutuhan infrastruktur maupun sumber daya manusia (Malini, 2021). DAK ini ditujukan untuk mendukung program-program pemerintah dengan konteks penyamaan tujuan prioritas nasional dan memperkuat layanan publik tertentu. Karakter dari DAK ini telah ditentukan sebagaimana mestinya namun pergerakan finansial dari DAK ini bersifat terbatas, sehingga tuntutan untuk menggali pendapatan masing-masing daerah menjadi satu topik yang krusial yang dinilai dari besar kecilnya aset yang dimiliki. Meskipun demikian, tinggi rendahnya aset pemerintah daerah seringkali menentukan baik buruknya kesejahteraan masyarakat didalamnya (Frolova et al., 2022). Pemerintah daerah dengan kondisi keuangan yang baik seringkali dapat menutupi kebutuhannya sendiri, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, daerah yang mampu mengelola aset dan belanjanya secara produktif cenderung lebih tangguh dalam menghadapi krisis, dibandingkan daerah yang masih sangat bergantung terhadap pemerintah pusat (Y. Chen & Zhang, 2024). Tingginya tingkat ketergantungan finansial terhadap pemerintah pusat berpotensi meningkatkan kerentanan fiskal karena daerah tidak memiliki ruang yang cukup untuk menyusun kebijakan adaptif di tengah ketidakpastian ekonomi (Botezan et al., 2020). Berdasarkan pemaparan yang dilakukan diatas maka hipotesis penelitian disusun sebagai berikut:

Akibat dari diterapkannya desentralisasi fiskal ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki perbedaan kekuasaan yang disebabkan karena adanya penyerahan kewenangan dan sumber daya fiskal dari pusat ke daerah (J. Wang et al., 2023). Perbedaan kekuasaan ini merupakan konsekuensi langsung dari pemberian otonomi daerah yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan mereka sendiri, termasuk pengumpulan dan pengelolaan dana melalui pajak dan retribusi (Frolova et al., 2022). Namun, dari segi keuangan, meskipun pemerintah daerah diberikan kekuasaan penuh untuk menggali dan mengelola keuangannya sendiri, pemerintah pusat melalui APBN tetap berusaha untuk mengalokasikan dana kepada pemerintah daerah melalui APBD yang berwujud dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Tingginya proporsi transfer dana dari pusat inilah seringkali membuat daerah kurang mandiri dalam mengelola keuangannya. Akibatnya akan menimbulkan risiko terhadap *financial sustainability* karena keberlangsungan fiskal daerah yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan pusat dan dinamika penerimaan negara. Tentunya, ketergantungan yang tinggi terhadap transfer negara inilah dinilai mampu untuk melemahkan kapasitas daerah dalam menjaga kesinambungan pendanaan pembangunan serta fleksibilitas fiskal. Sebaliknya, apabila semakin rendah tingkat ketergantungan finansial maka semakin besar peluang pemerintah untuk mencapai *financial sustainability* melalui peningkatan kemandirian fiskal dan penguatan kapasitas pendapatan asli daerah (4).

H1: Ketergantungan Finansial berpengaruh terhadap Financial Sustainability

Wujud dari adanya sistem desentralisasi fiskal adalah terbentuknya kemandirian daerah. Kemandirian daerah dapat didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai urusan pemerintahannya, pembangunannya, dan

pelayanan masyarakatnya dari sumber pendanaan daerahnya sendiri, tanpa terlalu bergantung pada bantuan dan transfer dana dari pemerintah pusat atau pihak luar lainnya (Botezan et al., 2020). Daerah yang memiliki tingkat kemandirian fiskal yang tinggi cenderung akan lebih fleksibel dalam Menyusun anggarannya tanpa terlalu dipengaruhi oleh kebijakan transfer pusat (Y. Chen & Zhang, 2024). Hal ini tentunya penting bagi financial sustainability di pemerintah daerah dikarenakan kemandirian fiskal yang kuat akan memperkuat kapasitas daerah dalam menjaga kesinambungan fiskal jangka Panjang, mengurangi risiko ketidakpastian pendanaan, serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang baik.

H2: Kemandirian Daerah berpengaruh terhadap Financial Sustainability

Pemerintah daerah tentunya dituntut untuk dapat mengelola keuangan dengan baik. Pengelolaan keuangan yang baik adalah kondisi dimana pemerintah daerah mampu untuk menyeimbangkan antara penerimaan dan pengeluaran daerah (Napu et al., 2025). Disinilah rasio keserasian bekerja, rasio keserasian pemerintah daerah diartikan sebagai ukuran yang menggambarkan proporsi alokasi dana belanja rutin dan belanja pembangunan terhadap total belanja. Adanya rasio ini bertujuan untuk melihat seberapa optimalnya pemerintah daerah dalam memprioritaskan penggunaan dananya, yang mana semakin tinggi rasio belanja pembangunan maka semakin baik alokasi dana yang digunakan untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat. Rasio ini menjadi indikator penting yang ideal untuk menunjukkan adanya keseimbangan sehingga pemerintah daerah tetap mampu menjaga keberlanjutan layanan publik sekaligus meningkatkan kualitas pembangunan. Oleh karena itu, rasio keserasian memiliki pengaruh terhadap financial sustainability. Hal tersebut dikarenakan pengelolaan belanja yang seimbang akan memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam mencapai keberlanjutan keuangan.

H3: Rasio Keserasian berpengaruh terhadap Financial Sustainability

Sebagai konsekuensi dari desentralisasi fiskal adalah adanya pembagian kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Namun, terkait dengan perekonomian, pemerintah pusat melakukan transfer dana ke pemerintah daerah yang bersumber dari APBN melalui APBD yang berwujud dana alokasi khusus (Nawir et al., 2023). Dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang digunakan pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan-kegiatan guna menyediakan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik seperti Kesehatan, Pendidikan, dan infrastruktur. DAK ini dibagi menjadi dua yakni DAK fisik yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan DAK non-fisik yang digunakan untuk membiayai program tertentu seperti Pendidikan dan Kesehatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kegunaan dari DAK ini banyak sekali namun ketergantungan yang terlalu besar pada DAK dapat menimbulkan kerentanan terhadap financial sustainability, hal ini dikarenakan keberlangsungan fiskal daerah menjadi sangat dipengaruhi oleh kebijakan pusat. Sebaliknya, apabila DAK yang dikelola secara efektif dan tepat sasaran, dana ini dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan memperkuat kapasitas fiskal jangka Panjang.

H4: Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Financial Sustainability

Belanja modal dalam pemerintah daerah adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun anggaran. Belanja modal ini diwujudkan dalam aset tetap seperti tanah, Gedung, peralatan, dan aset tak berwujud lainnya. Belanja modal ini bertujuan untuk menambah kekayaan daerah, mendukung kegiatan masyarakat, serta digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas publik di daerah tersebut. Alokasi belanja modal yang proporsional akan memperkuat kapasitas fiskal karena infrastruktur yang memadai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan daerah. Dengan demikian, belanja modal akan berkontribusi terhadap tercapainya financial sustainability, dikarenakan investasi pemerintah pada aset produktif yang mampu untuk menjaga kesinambungan fiskal dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer.

H5: Belanja Modal berpengaruh terhadap Financial Sustainability

Adanya desentralisasi fiskal menyebabkan pemerintah daerah memiliki kekuasaan yang berbeda-beda atas daerahnya masing-masing. Ada beberapa daerah yang memiliki kekuasaan wilayah kecil namun memiliki tingkat perekonomian yang besar, namun ada pula daerah yang memiliki kekuasaan wilayah yang besar namun memiliki perekonomian yang kecil. Besar kecil perekonomian daerah dapat diukur dengan total aset, jumlah pendapatan, maupun besaran anggaran yang dikelola (Gilmartin & Allan, 2015). Semakin besar ukuran pemerintah daerah maka akan semakin luas pula ruang fiskal yang dimiliki untuk menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik. Daerah dengan ukuran besar biasanya memiliki potensi ekonomi yang lebih beragam serta memiliki basis pendapatan yang lebih luas sehingga dapat mendukung tercapainya financial sustainability. Namun demikian, ukuran yang besar juga dirasa dapat berpotensi menimbulkan risiko pemborosan dan inefisiensi daerah jika tidak diimbangi dengan tata Kelola keuangan yang baik.

H6: Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Financial Sustainability

Financial sustainability didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk dapat mempertahankan pengelolaan keuangan daerahnya yang baik dan berkelanjutan dalam jangka Panjang, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan tanggung jawabnya tanpa mengorbankan kemampuan keuangan generasi mendatang (Lysiak et al., 2020). Dalam hal ini, financial sustainability sangat penting bagi pemerintah daerah karena menjadi fondasi untuk menjaga keberlangsungan fiskal jangka Panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan kondisi keuangan yang berkelanjutan, maka pemerintah daerah mampu untuk membiayai kebutuhan rutin maupun pembangunan tanpa harus terlalu bergantung terhadap transfer pusat atau menambah beban utang yang berlebihan. Financial sustainability juga memproyeksikan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja secara efisien sehingga hal ini memberikan kepastian bagi masyarakat bahwa pelayanan publik tetap terjaga meskipun terdapat tekanan ekonomi (Almalki, 2021). Selain itu, keberlanjutan fiskal akan memperkuat kemandirian daerah, meningkatkan kepercayaan

publik, serta menjadikan landasan penting bagi perencanaan pembangunan jangka Panjang yang lebih stabil dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/ Kota se-Jawa tahun 2020-2022. Penelitian ini menggunakan Kabupaten/ Kota se-Jawa tengah disebabkan karena pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sentris di pulau Jawa dengan kontribusi PDB triwulan II 2024 sebesar 57,04%¹⁸. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 339 Kabupaten/ Kota se-Jawa (113 Kabupaten/ Kota x 3 tahun). Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, dengan kriteria: (1) Pemerintah daerah meliputi Kabupaten/ Kota se-Jawa; (2) Pemerintah Daerah meliputi Kabupaten/ Kota se-Jawa yang mempublikasikan Laporan Keuangan; (3) Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota se-Jawa pada periode penelitian 2020- 2022; (4) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota se-Jawa yang telah diaudit; serta (5) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota se-Jawa yang menyajikan data lengkap. Selanjutnya, untuk pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang sudah ada, yang mana sumber data dalam penelitian ini berasal dari *website* BPK. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji data penelitian yang berupa *pooled data* selama periode 2020-2022 dengan bantuan SPSS 26. Berikut model penelitian yang digunakan:

$$FS = \alpha_1 + \beta_1 PAD + \beta_2 KGF + \beta_3 KMD + \beta_4 KES + \beta_5 DAK + \beta_6 BMD + \beta_7 SZE + \varepsilon \quad (1)$$

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

No.	Variabel Penelitian	Jenis Variabel	Kode	Definisi Variabel	Pengukuran
1	Financial Sustainability	Dependen	FS	Financial sustainability adalah keadaan dimana pemerintah daerah mampu untuk mengelola keuangan daerahnya saat ini sehingga tidak mengorbankan kemampuan keuangan generasi di masa yang akan datang.	KKU = Pendapatan Operasional – Beban Operasional – Pos Luar Biasa
2	Pendapatan Asli Daerah	Independen	PAD	PAD adalah penerimaan yang bersumber dari internal yang digunakan kepentingan pemerintahh daerah.	PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daee + Lain – Lain PAD yang sah
3	Ketergantungan Finansial	Independen	KGF	Ketergantungan finansial diartikan sebagai keadaan dimana pemerintah daerah terlalu bergantung pada peemerintah pusat melalui transfer daerah untuk mendanai layanan publiknya.	KGF = $\frac{\text{Dana Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$
4	Kemandirian Daerah	Independen	KMD	Kemandirian daerah adalah kondisi dimana pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan daerahnya tanpa terlalu bergantung terhadap transfer pusat.	KMD = $\frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$
5	Rasio Keserasian	Independen	KES	Rasio keserasian didefinisikan sebagai rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan dananya secara optimal antara belanja rutin dan belanja pembangunan.	KES = $\frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$
6	Dana Alokasi Khusus	Independen	DAK	Dana alokasi khusus adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah yang peruntukannya digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan khusus.	DAK = DAK Fisik + DAK Non – Fisik
7	Belanja Modal	Independen	BMD	Belanja modal adalah belanja yang dilakukan untuk memperoleh, menambah, mempertahankan aset tetap	BMD = $\frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$

No.	Variabel Penelitian	Jenis Variabel	Kode	Definisi Variabel	Pengukuran
8	Ukuran Pemerintah Daerah	Independen	SZE	dan/atau aset lainnya yang akan memberikan manfaat ekonomi lebih dari satu periode akuntansi. Ukuran pemerintah daerah adalah besar kecilnya kapasitas. Keuangan daerah di suatu wilayah.	SZE = Ln(Aset)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Pengujian

Tabel 2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Variabel	Unstandardized Residual (Spearman's Rho)	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
KGF	0.711	0.161	6.200
KMD	0.179	0.145	6.878
KES	0.155	0.988	1.012
DAK	0.064	0.599	1.670
BMD	0.586	0.426	2.349
SZE	0.360	0.266	3.765
F = 54.752	F sig. = <0.001	R Square = 0.510	Adj R.Square = 0.500
Kolmogorov Smirnov = <0.001		Monte Carlo =0.000	

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Unstd Coefficients Std. Error	Std Coefficients Beta(β)	T	Sig – value
(Constant)	1439353766312.387		-0.634	0.527
KGF	366981369810.316	0.109	1.116	0.265
KMD	395576445701.012	0.164	1.592	0.112
KES	221936382399.408	-0.429	-10.822	<0.001
DAK	0.120	-0.172	-3.382	<0.001
BMD	0.090	0.419	6.933	<0.001
SZE	48083314680.094	0.161	2.102	0.036

Berdasarkan tabel 3 diatas, didapatkan hasil bahwa ketergantungan finansial dan kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap financial sustainability dengan masing-masing nilai signifikansi (0.265 > 0.05) dan (0.112 > 0.05). Berikutnya, untuk variabel rasio keserasian berpengaruh terhadap financial sustainability dengan nilai signifikansi 0.001 < 0.05. Selanjutnya, variabel DAK juga ditemukan memiliki dampak terhadap financial sustainability dengan bukti nilai signifikansi sebesar 0.001 < 0.05. Kemudian, variabel belanja modal juga mempengaruhi financial sustainability dengan nilai signifikansi yang menunjukkan nilai 0.001 < 0.05. Terakhir, penelitian ini juga menemukan bahwa variabel ukuran pemda mempengaruhi financial sustainability dengan nilai signifikansi 0.036 < 0,05.

3.2 Pembahasan

Penelitian ini menemukan bahwa rasio keserasian, DAK, belanja modal, dan ukuran pemda berpengaruh terhadap financial sustainability. Selanjutnya, ketergantungan finansial dan kemandirian daerah tidak berdampak secara signifikan terhadap financial sustainability. Rasio keserasian adalah rasio *balancing* antara belanja rutin dengan belanja yang ditujukan untuk pembangunan daerah (Romanova et al., 2018). Mengapa rasio keserasian ini berpengaruh terhadap financial sustainability? Hal ini dikarenakan pemerintah daerah dikatakan *sustain* jika pemda mampu untuk membiayai kebutuhan operasional rutinnya tanpa mengganggu anggaran yang digunakan untuk melakukan pembelanjaan yang bertujuan untuk pembangunan daerah (Lhutfi & Sugiharti, 2022). Biasanya, pemda akan melakukan penganggaran dari pendapatan yang bersumber dari daerahnya sendiri dan transfer dari pusat. Pemda dituntut harus dapat melakukan pemisahan antara kedua belanja tersebut. Disini, pemda tidak diperkenankan untuk hanya fokus pada pembelanjaan rutin saja, namun juga harus memikirkan pembelanjaan pembangunan, hal ini dikarenakan pemda yang hanya fokus pada pembelanjaan rutin akan memiliki ruang fiskal yang sempit yang akan mempengaruhi pada kecilnya investasi jangka panjang dan pembiaayaan pembangunan yang mana dalam jangka panjang hal tersebut akan mempengaruhi keberlanjutan keuangan dan pemberian pelayanan publik (Lhutfi et al., 2020).

Dana alokasi khusus atau DAK menjadi topik yang hangat diperbincangkan. DAK adalah dana alokasi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk belanja daerah yang fokus pada tujuan-

tujuan khusus tertentu baik fisik maupun non-fisik seperti pembangunan jalan, irigasi, sekolah, dan lain sebagainya dengan harapan tidak adanya kesenjangan antar daerah (Azaki & Lutfi, 2023). Dengan adanya DAK ini maka DAK adalah komponen penting dalam suatu daerah yang ditujukan sesuai dengan peruntukannya. Namun, perlu sekali dilakukan pengelolaan DAK yang efisien, hal ini dikarenakan jika DAK besar maka menunjukkan bahwa kemandirian fiskal dari suatu daerah rendah, yang mana hal ini membuat pemerintah daerah memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat (Agustina et al., 2022). Oleh karena itu, DAK memang secara stabilitasnya mempengaruhi keberlanjutan keuangan dalam jangka panjang dengan tujuan pembelanjaan pembangunan yang bersifat *sustain* namun untuk mencapai suatu keberlanjutan keuangan yang baik harus diiringi dengan pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) yang baik pula (Hakim & Busnetty, n.d.).

Belanja modal adalah belanja yang ditujukan untuk memperoleh aset tetap seperti tanah, bangunan, gedung, dan lain sebagainya yang tujuannya untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat (Kambey et al., 2024). Pelayanan ini dapat berupa pelayanan kesehatan, pendidikan, maupun fasilitas umum. Tentunya, belanja modal ini memiliki pengaruh terhadap keberlanjutan keuangan dalam jangka panjang, disebabkan karena tujuan dari belanja modal sendiri adalah memperoleh aset jangka panjang yang ditujukan untuk memberikan pelayanan publik dalam jangka panjang dengan maksimal (Cahyani et al., 2024). Dengan adanya belanja modal ini pemerintah telah melakukan investasi jangka panjang yang mampu untuk mendatangkan pendapatan di masa depan. Dengan hal ini pastinya pemda dapat meningkatkan kapasitas aset dan pendapatan sendiri yang nantinya akan mendatangkan kemandirian bagi masing-masing pemda (Ariyanto & Nasiansenus Masdjojo, 2025). Dapat ditarik kesimpulan bahwa belanja modal adalah komponen vital dalam keberlanjutan keuangan daerah. Jika belanja modal dikelola dengan baik maka akan mempengaruhi kapasitas fiskal pemda secara berkelanjutan (M. Chen & Zhang, 2025).

Ukuran pemerintah daerah adalah besar kecilnya aset yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Semakin besar ukuran pemerintah daerah dapat dikatakan bahwa daerah tersebut kaya dan mampu untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing tanpa mengorbankan anggaran lain dan tanpa mengorbankan pendapatan di masa depan. Sebaliknya, pemda dengan aset yang kecil dinilai belum mampu untuk memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri. Namun, ukuran daerah ini belum mampu menjadi satu tolak ukuran apakah pemerintah daerah tersebut memiliki tingkat kemandirian yang tinggi dan ketergantungan pada dana pusat yang rendah, ataupun sebaliknya. Pemerintah daerah yang besar seringkali dikonotasikan dengan besarnya aset yang dimiliki oleh pemda tersebut, besarnya pendapatan daerah yang dapat digali secara maksimal, efisiennya belanja publik, baiknya pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh manajemen daerah tersebut, serta rendahnya ketergantungan fiskal pada pemerintah pusat (Nasirwan et al., 2024), begitu pula sebaliknya. Ukuran pemda ini menjadi pengaruh bagi keberlanjutan keuangan yang dinilai pengaruhnya sangat kompleks dan interaktif sesuai dengan kapasitas manajemen pemda, pendapatan, dan efisiensi belanja operasionalnya (Lestari & Nurkhin, 2023).

Kemandirian daerah sering dikaitkan dengan kemampuan daerah tersebut untuk menghasilkan dan menggali pendapatannya sendiri dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki (P.Sh, 2024). Dalam penelitian ini menemukan bahwa kemandirian daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan keuangan daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa daerah yang memiliki tingkat PAD yang tinggi belum tentu mampu untuk menjaga stabilitas fiskal jangka panjang. Dalam praktiknya, peningkatan PAD seringkali juga diikuti dengan tingginya ekspansi belanja rutin yang dinilai kurang efektif, sehingga tidak secara langsung PAD dapat memperkuat fiskal daerah untuk menghadapi krisis dalam jangka Panjang (Petreski, 2024). Hal ini disebabkan karena jika kemandirian fiskal daerah diukur secara kuantitatif dengan menekankan pada aspek besar kecilnya PAD yang dimiliki belum tentu dapat secara utuh menangkap kualitas dari pengelolaan keuangan dan efisiensi belanja di masing-masing daerah (Dewi Haptari et al., 2022; Lestari & Nurkhin, 2023).

Ketergantungan finansial pemerintah daerah didefinisikan sebagai sejauh mana pemerintah daerah bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai kegiatan pembangunan dan operasionalnya, dengan asumsi bahwa PAD yang ada belum memadai untuk memenuhi semua kebutuhan daerah (Fathiyah et al., 2022). Temuan ini menunjukkan bahwa ketergantungan finansial pada pemerintah pusat tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberlanjutan keuangan jangka panjang. Meskipun dana transfer dari pemerintah pusat merupakan salah satu sumber krusial yang digunakan untuk menutup kesenjangan fiskal dan menjamin keberlangsungan layanan publik, sifatnya seringkali relatif stabil, namun hal ini membuat dana transfer dari pemerintah pusat hanya ditempatkan sebagai penopang operasional jangka pendek saja dibandingkan dengan memposisikannya sebagai instrumen penguatan fiskal jangka Panjang. Dikarenakan sifatnya yang stabil, hal tersebut mengurangi pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi belanja. Sama halnya dengan kemandirian daerah, ketergantungan fiskal hanya dilihat secara kuantitatif saja, yang tampaknya kedua hal tersebut lebih dipengaruhi oleh bagaimana anggaran dikelola dan dialokasikan secara strategis (Said Saleh Salihi, 2023).

4. KESIMPULAN

Studi ini menemukan bahwa rasio keserasian, DAK, belanja modal, dan ukuran pemda berpengaruh terhadap financial sustainability. Sedangkan, ketergantungan finansial dan kemandirian daerah tidak berdampak secara signifikan terhadap financial sustainability. Penelitian ini memiliki keterbatasan bahwa data yang digunakan hanya mencakup kabupaten/kota di pulau Jawa, tentunya penelitian ini tidak dapat sepenuhnya menggeneralisir seluruh aspek yang ada di masing-

masing kabupaten/ kota lainnya yang dimungkinkan memiliki karakteristik keuangan yang berbeda. Selain itu, tahun penelitian juga menjadi masalah krusial yang mana tahun penelitian dalam penelitian ini yang digunakan hanya dari tahun 2020-2022 dengan justifikasi dari penulis adalah tahun dimana terjadinya dan pasca pendek pandemi 19 yang merupakan salah satu kejadian luar biasa dalam dunia perekonomian, sehingga penelitian ini dinilai mampu untuk menjawab bagaimana kondisi perekonomian di masa dan pasca pendek pandemi, dengan harapan bahwa jika suatu saat pemerintah daerah menghadapi situasi yang sama dengan kejadian yang berbeda diharapkan penelitian ini mampu menjawab hal-hal mana yang harus dipertimbangkan agar pemerintah daerah mampu untuk menghadapi dan *sustain* pasca hal tersebut terjadi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pada periode pandemi dan pasca-pandemi yang mana faktor-faktor yang berkaitan dengan pengelolaan belanja dan kapasitas fiskal daerah memiliki peran yang lebih dominan dalam menentukan financial sustainability dibandingkan faktor pendapatan daerah. Berbeda dengan kondisi normal, sebelum pandemi umumnya terdapat penekanan mengenai pentingnya peningkatan PAD dan kemandirian fiskal sebagai indikator utama keberlanjutan fiskal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada masa krisis kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola struktur belanja, memanfaatkan DAK, serta mengoptimalkan belanja modal menjadi faktor yang lebih menentukan dalam menjaga keberlanjutan keuangan daerah. Kondisi ini dapat dijelaskan karena pandemi menyebabkan terjadinya penurunan aktivitas ekonomi yang berdampak pada penerimaan daerah, sementara kebutuhan belanja publik semakin meningkat secara signifikan guna mendukung sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi. Penelitian ini diharapkan menjadi titik awal yang mampu untuk membuka penelitian-penelitian lain berikutnya terkait dengan pemerintah daerah dengan menekankan pada tata kelola pemerintah daerah, yang merupakan salah satu aspek penting dalam keberlanjutan keuangan. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan wilayah di luar Pulau Jawa menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Riset, Pengabdian kepada Masyarakat, Publikasi, dan Sentra Kekayaan Intelektual (DRPPS) Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan dukungan, baik dalam bentuk fasilitas, pendanaan, maupun arahan selama proses penelitian ini berlangsung. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan karya ilmiah ini. Semoga segala bantuan dan kontribusi yang diberikan menjadi amal jariyah yang bermanfaat.

REFERENCES

- Abraham, R., El Chaarani, H., & Tao, Z. (2024). The Impact of Audit Oversight Quality on the Financial Performance of U.S. Firms: A Subjective Assessment. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(4). <https://doi.org/10.3390/jrfm17040151>
- Agustina, F., Pramono, A. J., Akbar, B., Arif, A. (2022). Factors Determining Low Regional Financial Independence: Financial Autonomy and Degree of Decentralization. *AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA*, 8(1), 117–130. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v8i1>
- Almalki, Z. S. (2021). COVID-19's Economic Impact on the Global Health Systems: Time to Respond to New Realities. *Journal of Pharmaceutical Research International*, 33(24A): 85–91. <https://doi.org/10.9734/jpri/2021/v33i24a31434>
- Ariyanto, K., & Nasiansenus Masdjojo, G. (2025). Determinan Belanja Modal Untuk Membangun Kemandirian Keuangan Daerah. *JURNAL LITBANG KOTA PEKALONGAN*, 23(1), 45–54. <https://doi.org/10.54911/litbang.v23i1.1036>
- Azaki, N., & Lutfi, A. (2023). Capital Grants For Local Infrastructure Provision In Perspective Of Allocative Efficiency: Evidence From Indonesia. In *Naufal Azaki & Achmad Lutfi/ JPAS* (Vol. 8, Number 1).
- Botezan, C., Constantin, V., Meltzer, M., Radovici, A., Pop, A., Alexandrescu, F., & Stefanescu, L. (2020). Is there sustainable development after mining? A case study of three mining areas in the apuseni region (Romania). *Sustainability (Switzerland)*, 12(23), 1–20. <https://doi.org/10.3390/su12239791>
- Cahyani, A. D., Dewata, E., & Mayasari, R. (2024). The Influence of Regional Debt and Capital Expenditures on Financial Sustainability in Provincial Governments in Indonesia. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 8(3), 601–614. <https://doi.org/10.36555/jasa.v8i3.2688>
- Chen, M., & Zhang, Y. (2025). Fiscal Vertical Imbalances and the Building of Subnational Financial Capacity. *Journal of Global Economy, Business and Finance*, 7(8), 13–15. [https://doi.org/10.53469/jgebef.2025.07\(08\).04](https://doi.org/10.53469/jgebef.2025.07(08).04)
- Chen, Y., & Zhang, Z. (2024). Industry Heterogeneity and the Economic Consequences of Corporate ESG Performance for Good or Bad: A Firm Value Perspective. *Sustainability (Switzerland)*, 16(15). <https://doi.org/10.3390/su16156506>
- Dewi Haptari, V., Muliarta Ginting, A., David Aritonang, F., Keuangan Negara STAN, P., Keuangan, K., Penelitian, P., Keahlian, B., Dpr, S. R., & Pusat Statistik, B. (2022). Strategy For Increasing Regional Original Income Through Strengthening Some Factors In Regional Financial Independence-Vissia Dewi Haptari, et al Strategy For Increasing Regional Original Income Through Strengthening Some Factors In Regional Financial Independence under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). *Jurnal Ekonomi*, 11(3). <http://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi>
- Fathiyah, F., Iskandar Nasution, Bambang Niko Pasla, Fahmi Rasid, & Muhammad Arif. (2022). Ratio Analysis of Regional Dependence and Independence in Measuring the Regional Financial Capability of the Jambi Provincial Government. *Jurnal Prajaiswara*, 3(1), 65–74. <https://doi.org/10.55351/prajaiswara.v3i1.43>
- Frolova, M., Pérez-Pérez, B., & Herrero-Luque, D. (2022). Diverse responses of coastal communities to offshore wind farming development in Southern Spain. *Moravian Geographical Reports*, 30(4), 324–339. <https://doi.org/10.2478/mgr-2022-0021>

- Gilmartin, M., & Allan, G. (2015). Regional Employment Impacts of Marine Energy in the Scottish Economy: A General Equilibrium Approach. *Regional Studies*, 49(2), 337–355. <https://doi.org/10.1080/00343404.2014.933797>
- Hakim, -----Albert Alexander, & Busnetty, I. (n.d.). Pengaruh Dau, Dak, Pdrb, Dan Inflasi Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat. <https://doi.org/10.37010/jdc.v5i2>
- Kambey, N. H., Runtu, T., & Mawikere, L. M. (2024). Evaluasi penerapan belanja modal berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 di Pemerintah Kota Manado. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 497–510. <https://doi.org/10.58784/rapi.257>
- Kurniawan, K. (2022). The Impact of Regional Financial Capability during the COVID-19 Pandemic towards Regional Fiscal Capacity. *Saudi Journal of Economics and Finance*, 6(2), 81–86. <https://doi.org/10.36348/sjef.2022.v06i02.006>
- Lestari, R., & Nurkhin, A. (2023). Determinant Factors of Local Government Financial Performance (Using Financial Condition Dimension as Indicator). *Indonesian Management and Accounting Research*, 20(2), 335–360. <https://doi.org/10.25105/imar.v20i2.13968>
- Lhutfi, I., Ritchi, H., & Yudianto, I. (2020). Do the Growth of Original Local Government Revenues and the Growth of Capital Expenditure Affect Fiscal Stress? *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 23(1), 1–11. <https://doi.org/10.14414/jebav.v23i1.1727>
- Lhutfi, I., & Sugiharti, H. (2022). Financial sustainability of local governments in indonesia. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 14(1), 159–170. <https://doi.org/10.17509/jurnal>
- Lysiak, L., Kachula, S., Hrabchuk, O., Filipova, M., & Kushnir, A. (2020). Assessment of financial sustainability of the local budgets: case of Ukraine. *Public and Municipal Finance*, 9(1), 48–59. [https://doi.org/10.21511/pmf.09\(1\).2020.05](https://doi.org/10.21511/pmf.09(1).2020.05)
- Malini, H. (2021). Factors Affecting Capital Expenditures And Community Welfare In Kalimantan. 8(2), 78–86.
- Muneer, S., Singh, A., Choudhary, M. H., Alshammari, A. S., & Butt, N. A. (2025). Does Environmental Disclosure and Corporate Governance Ensure the Financial Sustainability of Islamic Banks? *Administrative Sciences*, 15(2). <https://doi.org/10.3390/admsci15020054>
- Napu, F., Syaifuddin, D. T., Wawo, A. B., & Zaid, S. (2025). Study of Financial Management Behavior Based on Financial Self-Efficacy and Financial Literacy in Small-Scale Agribusiness Development. *Journal of Global Innovations in Agricultural Sciences*, 13(1), 319–331. <https://doi.org/10.22194/JGIAS/25.1547>
- Nasirwan, Br. Ginting, A., Manalu, C., Amelia Sinaga, D., & Sinaga, Desy Amelia. (2024). The Influence of Local Government Size and Economic Growth on Local Government Financial Performance. In *Economic: Journal Economic and Business* 3(3): 165–171.
- Nawir, D., Bakri, M. D., & Syarif, I. A. (2023). Central government role in road infrastructure development and economic growth in the form of future study: the case of Indonesia. *City, Territory and Architecture*, 10(1). <https://doi.org/10.1186/s40410-022-00188-9>
- Petreski, M. (2024). The Fiscal Space And The Fiscal Stimulus During Crisis In The Western Balkans. *Economic Annals*, 69(242), 7–25. <https://doi.org/10.2298/EKA2442007P>
- P.Sh, U. (2024). The Need To Increase The Potential Of The Republic's Provinces And District Financial Resources During The Coronavirus Pandemic. *European Journal of Contemporary Business Law & Technology: Cyber Law, Blockchain, and Legal Innovations*, 1(4), 9–12. <https://doi.org/10.61796/ejcbt.v1i4.489>
- Rahmawati, E. (n.d.). *Policy Strategies in the Implementation of Referral Health Service Transformation*. Retrieved <https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp>
- Romanova, N., Anisimova, N., & Provotorov, I. (2018). Application of budgeting tools to cut structural imbalances in regional development. *MATEC Web of Conferences*, 239. <https://doi.org/10.1051/mateconf/201823908017>
- Said Saleh Salihi. (2023). Analysis of Regional Financial Independence and Effectiveness in North Buton District. *International Journal of Advanced Technology and Social Sciences*, 1(4), 245–258. <https://doi.org/10.59890/ijatss.v1i4.1031>
- Shimada, H., Asano, K., Nagai, Y., & Ozawa, A. (2022). Assessing the Impact of Offshore Wind Power Deployment on Fishery: A Synthetic Control Approach. *Environmental and Resource Economics*, 83(3), 791–829. <https://doi.org/10.1007/s10640-022-00710-0>
- Tyler, G., Bidwell, D., Smythe, T., & Trandafir, S. (2022). Preferences for community benefits for offshore wind development projects: A case study of the Outer Banks of North Carolina, U.S. *Journal of Environmental Policy and Planning*, 24(1), 39–55. <https://doi.org/10.1080/1523908X.2021.1940896>
- Wang, D., Zhang, E., & Liao, H. (2022). Does Fiscal Decentralization Affect Regional High-Quality Development by Changing Peoples' Livelihood Expenditure Preferences: Provincial Evidence from China. *Land*, 11(9). <https://doi.org/10.3390/land11091407>
- Wang, J., Xia, L., Zhou, F., Chen, C., & Zhu, Q. (2023). Impacts of the Integrated Development of Agriculture and Tourism on Sustainable Development of Agriculture – Based on Provincial Data of China from 2008 to 2019. *Polish Journal of Environmental Studies*, 32(4), 3825–3843. <https://doi.org/10.15244/pjoes/163566>